

ABSTRAK

SINKRONISASI ATAS INTERPRETASI PEMBAGIAN HARTA PAILIT KEPADA TENAGA KERJA YANG DIDAHULUKAN TERHADAP TAGIHAN HAK NEGARA

(Analisis Putusan Mk No. 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Tenaga Kerja dan Pajak Negara Dalam Pembagian Harta Pailit)

Andre Rizaldy, Muthia Sakti, Iwan Erar Joesoef

Pekerja/buruh adalah pihak yang berhak atas harta pailit untuk utang upah pembayarannya dan/atau hak-hak pembayaran mereka atas kontribusi kerja yang telah diberikan pada Perusahaan yang telah dinyatakan pailit seperti yang dinyatakan dalam Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013. Mereka layak untuk didahulukan karena kontribusi yang telah diberikan dan diatur dalam tindak lanjut putusan *a quo* melalui Pasal 95 (4) Undang-Undang tentang Ketenakerjaan sebagaimana yang mendahulukan pelunasan utang upah buruh pekerja dan hak-hak pembayaran lainnya ketika perusahaan pailit dari kreditur lainnya. Namun, terdapat ketentuan Pasal 19 (6) Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Jo. Pasal 21 (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang masih mempertahankan ketentuan mendahulukan hak tagihan utang pajak dari kreditur lainnya. Hal tersebut menciptakan ketidaksinkronan hukum dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan sinkronisasi berkaitan erat dengan kepastian hukum dan keadilan. Keadilan dan kepastian hukum adalah 2 hal berdampingan untuk menciptakan *just law*. Ketika tenaga kerja tidak diberikan rumusan norma yang sinkron, maka hal tersebut mengakibatkan banyaknya kasus-kasus utang upah dan hak-hak pembayaran buruh/pekerja dikesampingkan. Sinkronisasi antar sesama undang-undang yang tidak sinkron dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 perlu secara vertikal, horizontal, dan fungsional. Sinkronisasi Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 penting dilakukan mengingat pertimbangan dan amar putusannya yang mengubah hierarki hak pendahuluan kreditur dengan lahirnya jenis kreditur baru yaitu kreditur preferen absolut untuk utang upah buruh/pekerja dan kreditur preferen prioritas untuk pembayaran hak-hak buruh/pekerja..

Kata Kunci : Pailit, Tenaga Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi,

ABSTRACT
**LEGAL SYNCHRONIZATION OF BANKRUPTCY ASSET DISTRIBUTION:
PRIORITIZING WORKERS OVER STATE TAXES**

***(An Analysis of the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 Regarding
the Position of Workers and State Taxes in Bankruptcy Asset Distribution)***

Andre Rizaldy, Muthia Sakti, Iwan Erar Joesoef

Workers/laborers are parties who are entitled to bankruptcy property for their wage debts and/or their payment rights for work contributions that have been given to the Company that has been declared bankrupt as stated in the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013. They deserve to be prioritized because of the contributions that have been given and regulated in the follow-up to the decision through Article 95 (4) of the Law on Unemployment as it prioritizes the repayment of debts, labor wages, and other payment rights when the company goes bankrupt from other creditors. However, there are provisions of Article 19 (6) of the Law on Tax Collection by Compulsory Letter Jo. Article 21 (3) of the Law on General Provisions and Tax Procedures which still maintains the provision of prioritizing the right to collect tax debts from other creditors. This creates legal inconsistency and has implications for legal uncertainty. This research uses a normative-juridical research type with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach.

The results of this study show that synchronization is closely related to legal certainty and justice. Justice and legal certainty are 2 things side by side to create *just law*. When labor is not given a synchronous formulation of norms, it results in many cases of wage debt and workers' payment rights being set aside. Synchronization between fellow laws that are not in sync with the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 needs to be vertical, horizontal, and functional. The synchronization of the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 is important considering the considerations and warnings of its decision which changed the hierarchy of creditors' preliminary rights with the birth of a new type of creditor, namely absolute preferred creditors for labor/worker wage debts and priority preferred creditors for the payment of labor/worker rights.

Keywords: Bankruptcy, Workers, Constitutional Court Decision